



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
												✓																		

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
											✓

TAHUN

2015

HALAMAN

18

Opini Daerah Turun, BPK Dinilai Gagal

TARAKAN – Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kaltara semester II tidak melakukan evaluasi pada angka-angka serapan APBD pemerintah daerah di Kaltara, melainkan pada kesiapan

5 kabupaten/kota juga Provinsi Kaltara pada penggunaan sistem berbasis akrual.

Dari 5 kabupaten/kota saat ini 2 di antaranya sudah selesai dievaluasi persiapan termasuk Provinsi

Kaltara sendiri. Yang dilihat dari evaluasi ini yakni komitmen pemimpin tiap-tiap daerah, komitmen regulasi, kesiapan SDM, kesiapan IT dan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dalam penggunaan sistem ini.

Diungkapkan Kepala BPK RI Kaltara Ade Iwan Ruswana, pada laporan semester II ini memang tidak akan bermain pada angka-angka dan lebih kepada kuantitatif kesiapan untuk penggunaan sistem baru yang serentak di Indonesia.

"Memang saat ini kami menunda untuk pemeriksaan keuangan, sehingga memang dialokasikan untuk pemantauan kesiapan tiap-tiap daerah juga provinsi dalam penggunaan sistem berbasis akrual ini," jelas Ade.

Dengan indikator pemeriksaan dalam evaluasi tersebut bisa disimpulkan kesiapannya, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan ada 3 kabupaten/kota yaitu Tarakan, KTT dan juga Bulungan.

"Ini masih proses kami lakukan pemeriksaan, jadi memang belum bisa dikeluarkan hasilnya," tutur Ade.

Berkaitan dengan sistem kesiapan penerapan berbasis akrual ini,

memang dilakukan agar tahun 2016 dapat dilihat hasilnya pada laporan keuangan semester I, sehingga tahun selanjutnya pemeriksaan akan bermain pada angka-angka.

"Nanti tahun depan pemeriksaan laporan keuangan kami, betul-betul menguji angka dari sisi penyajian mereka apakah sukses dengan sistem akuntansi akrual mudah-mudahan tidak terjadi penurunan opini," harap Ade.

Hasil dari kesiapan Kaltara, Nunukan dan Malinau sendiri diakui Ade memang tiap-tiap daerah sangat kekurangan tenaga akuntan, lalu teknologi informasi yang masih belum memadai dan juga pimpinan kepala daerah yang tidak begitu paham dengan itu dapat dievaluasi dari laporan ini.

"Memang masih sangat minim terutama dalam SDM akuntan," jelas Ade.

Hasil Provinsi Kaltara sebetulnya dalam posisi daerah transisi sudah cukup baik, mulai dari sistem, kepemimpinannya juga cukup baik, namun SDM juga sangat

kurang dan ini dan ini dimaklumi karena masih daerah pemekaran.

"Kami masih memaklumi, karena memang Kaltara masih baru dan belum memiliki banyak SDM," ujar Ade.

Lalu, Nunukan dan Malinau cukup baik dengan sistem yang cukup memadai, namun memang Malinau masih ada yang kurang tetapi ini masih dalam tahap wajar dan dapat membicarakan kekurangan ini untuk dapat dibantu oleh BPKP.

"Saya kira masih sangat wajar untuk tahan awal penerapan sistem berbasis akrual," jelas Ade.

Lanjutnya, ketika pada 2016 nanti akan dilakukan pemeriksaan laporan keuangan, lalu Provinsi Kaltara, dan 5 kabupaten/kota minimal opininya harus tetap. Jika nanti opininya menurun, artinya, tiap-tiap daerah tidak siap dengan sistem baru ini.

"Kalau misalnya seluruh kabupaten kota di provinsi Kaltara meraih opini disclaimer semua, yah artinya kami, belum berhasil membina. Yah mudahn-mudahan lebih bagus," ungkap Ade. (nri/asm)